

## **PENERIMAAN PAD DI JAWA TIMUR, EFISIENKAH?<sup>1</sup>**

***Rossanto Dwi Handoyo<sup>2</sup>***

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

### ***ABSTRACT***

*The term of efficiency in the scheme of central/local revenues (APBN/APBD) is about revenue optimalization regarding the value of money which covers not only efficient but also economic and effective terms (Ritonga, 2003). Efficient means the benefit aspects or the optimal result must be achieved with the lower cost relatively.*

*This research aims to find out from which side the inefficiency can occur, is it from output side (the component of local revenue/PAD) or input side (the cost to gather local revenue) using Data Envelopment Analysis Method?*

*The analysis result that there are 21 municipalities/cities which occur the complete efficiency from output and input side, such as Bondowoso, Kediri, Malang city, Surabaya city, Magetan, Sidoarjo, Tranggalek, Gresik, Kediri city, Mojokerto city, Lamongan, Nganjuk, Situbondo, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Madiun city, Probolinggo city, Madiun, Ngawi and Sumenep. Meanwhile, there are 17 other municipalities/cities which do not occur efficiency from output and input side, such as Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Blitar, Ponorogo, Batu city, Pasuruan city, Lumajang, Sampang, Tulung Agung, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar city, and Malang.*

*The largest sources of inefficiency from the input side are the unexpected expenses, official fare, maintenance expenses, and officials expenses. In addition, The largest sources of inefficiency from the output side are the profit of Local Owned Enterprises and local tax. In contrast, the largest efficiency achievement from the input side are goods and services expenses and capital expenditure. And, the largest efficiency achievement from the output side are retribution and other local revenues.*

*Keywords : East Java Municipalities/cities Governments Local revenues, Efficiency, Data Envelopment Analysis*

---

<sup>1</sup> Penelitian ini dibiayai dari DIPA PNBPN UNAIR tahun 2007

## I. PENDAHULUAN

Hakikat efisiensi dalam rangka perencanaan penerimaan APBN/APBD, pada dasarnya adalah optimalisasi penerimaan APBN/APBD menyangkut nilai uang (*value of money*), yang meliputi tidak hanya nilai efisien akan tetapi juga ekonomis dan efektif (Ritonga, 2004). *Efisien* yaitu aspek manfaat atau hasil yang optimal harus dapat dicapai dengan biaya (*cost*) yang relatif lebih kecil. Anggaran dapat meningkatkan efisiensi apabila dengan biaya yang relatif kecil dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, atau dengan biaya yang sama dapat meningkatkan hasil yang dicapai. Sementara efektif yaitu hasil yang dicapai dari suatu pengeluaran dana sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektif lebih pada pencerminan kemampuan untuk mencapai “tepat sasaran”.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isu utama PAD dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang menurut sebagian pihak seyogyanya cukup signifikan besarnya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa PAD kabupaten/kota secara umum hanya memiliki peran yang marginal terhadap APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wibowo (2004) mengatakan bahwa memasuki era desentralisasi, rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota mengalami penurunan. Dilihat dari kabupaten/kota secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum desentralisasi mencapai 10,2 persen, turun menjadi 8,1 persen pada era desentralisasi, atau mengalami penurunan sebesar 2,1 persen. Kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran pada era desentralisasi menunjukkan penurunan apabila dibandingkan sebelum desentralisasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan lainnya yang merupakan salah satu komponen PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi inefisiensi dalam penerimaan PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan biaya pemungutannya. Makalah ini akan mencoba menjawab dari sisi mana inefisiensi bisa terjadi apakah dari sisi *output* (penerimaan PAD) ataukah dari sisi *inputnya* (biaya yang dikeluarkan untuk memungutnya)?.

Secara umum makalah ini bertujuan untuk menganalisis struktur inefisiensi penerimaan PAD dari sisi *outputnya* (hasil penerimaan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah,

dan komponen penerimaan PAD yang lain) dan dari sisi *inputnya* (biaya pemungutan pajaknya seperti biaya pegawai, biaya belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, biaya modal, biaya bagi hasil dan bantuan keuangan, biaya lain-lain dan pengeluaran tidak terduga) pada era desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004.

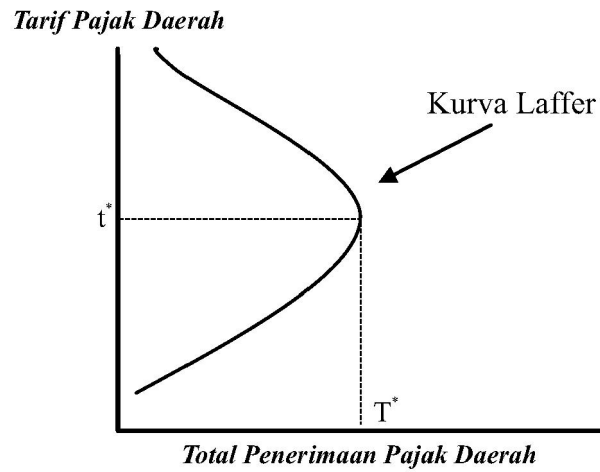
## 2. KERANGKA TEORITIS

### Model Leviathan

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu : (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah Daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan.

Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan *ceteris-paribus* level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka **Gambar 1** di bawah ini menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva ("*Laffer*") yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah "*economic behavior*" dari wajib pajak.

Gambar ini juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independen terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum ( $T^*$ ) pada tarif  $t^*$ . Pada tarif  $t^*$ , menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai *Revenue Maximizing Tax Rate*. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum. Model Leviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal.



Sumber: Siddik, Machfud

**Gambar 1 Model Leviathan**

### 3. METODE PENELITIAN

#### Sumber Data

Data Penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Badan pusat Statistik tahun 2005 yang berupa “Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2003-2004”. Dari sisi output atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Dari sisi *input*nya yang dipakai dalam makalah ini adalah Belanja Pelayanan Publik. Belanja ini adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja Pelayanan Publik ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja lain-lain, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

#### Data Envelopment Analysis

*Data Envelopment Analysis* (DEA) yang sering disebut analisis frontier pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. DEA digunakan

untuk mengukur dan mengevaluasi efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi/UKE (*decision making unit/DMU*) suatu organisasi. Unit kegiatan ekonomi yang dapat diaplikasikan dengan DEA antara lain bank, medis (*healt care*), pendidikan (*education*), rumah sakit, kantor polisi, kantor pajak, perusahaan penerbangan serta unit kegiatan lainnya. Sejak teknik ini diperkenalkan pertama kali, sudah banyak teori ataupun studi empiris dilakukan.

DEA (Charnes, et al. (1978), Banker, et al. (1984)), adalah sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur efisiensi teknik suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) dan membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain. DEA mula-mula dikembangkan oleh Farrel (1957) yang mengukur efisiensi teknik satu *input* dan satu *output*, menjadi multi *input* dan multi *output*, menggunakan kerangka nilai efisiensi relatif sebagai rasio *input* (*single virtual input*) dengan *output* (*single virtual output*) (untuk pustaka lebih lanjut lihat Giuffrida dan Gravelle, 2001:4, Lewis, et al. 1999; 907-912, Post dan Spronk, 1999; 3).

Efisiensi diukur sebagai berikut :

$$\dots\dots\dots (1)$$

di mana :

$h_s$  adalah efisiensi teknik UKE  $s$

$y_{is}$  merupakan jumlah *output*  $i$  yang diproduksi oleh UKE  $s$ .

$x_{js}$  adalah jumlah *input*  $j$  yang digunakan oleh UKE  $s$

$u_i$  merupakan bobot *output*  $i$  yang dihasilkan oleh UKE  $s$

$v_j$  adalah bobot *input*  $j$  yang diberikan oleh UKE  $s$ , dan  $i$  dihitung dari 1 ke  $m$  serta  $j$  dihitung dari 1 ke  $n$ .

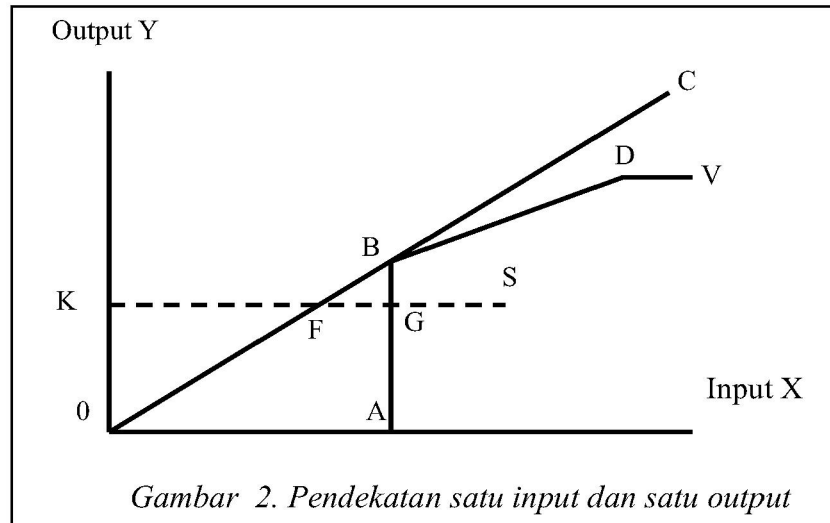
Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan satu variabel *input* dan satu *output*. Rasio efisiensi ( $h_s$ ), kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut :

$$\dots\dots\dots (2)$$

dan

Di mana  $N$  menunjukkan jumlah UKE dalam sampel. Pertidaksamaan pertama menunjukkan adanya efisiensi rasio untuk UKE lain tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Sebuah UKE dikatakan efisien apabila memiliki angka rasio mendekati 1 atau 100 persen, sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan efisiensi UKE yang semakin rendah.

Pada DEA, setiap UKE dapat menentukan pembobotnya masing-masing dan menjamin bahwa pembobot yang dipilih akan menghasilkan ukuran kinerja yang terbaik.



Gambar 2. Pendekatan satu input dan satu output

Sumber : Miller dan Noulas (1996)

Gambar 2. menunjukkan adanya penggunaan satu variabel *input* dan satu *output*. Teknologi CRS ditunjukkan oleh frontier OC. UKE dikatakan efisien bila berada pada garis frontier, sedangkan yang berada di luar garis frontier dikatakan tidak efisien.

Beberapa bagian program linear ditransformasikan kedalam program *ordinary linier* secara primal atau dual sebagai berikut :

Maksimisasi .....(3)

Kendala

dan  $u_i$  dan  $v_j \geq 0$  .....(4)

Efisiensi pada masing-masing UKE dihitung menggunakan programasi linier dengan memaksimalkan jumlah *output* yang dibobot dari UKE s. Kendala jumlah *input* yang dibobot harus sama dengan satu untuk bank s, sedangkan kendala untuk semua bank, yaitu jumlah *output* yang dibobot dikurangi jumlah *input* yang dibobot harus kurang atau sama dengan 0. Hal ini berarti semua bank akan berada atau di bawah referensi kinerja frontier yang merupakan garis lurus yang memotong sumbu origin (Insukindro, dkk, 2000:20).

Sementara jika teknologi dianggap *variable return to scale*, maka efisiensi berada pada garis ABDV. Dengan asumsi ini maka titik A,B,D, dan V dikatakan efisien. Programasi linier yang menunjukkan asumsi VRS adalah :

$$\text{Maksimisasi} \quad + \quad \dots\dots\dots(5)$$

Kendala

$$\text{dan } u_i \text{ dan } v_j \geq 0 \quad \dots\dots\dots(6)$$

Di mana merupakan penggal yang dapat bernilai positif atau negatif. Transformasi juga dapat dilakukan secara dual dengan minimisasi *input* sebagai berikut :

$$\text{Minimisasi} \quad \dots\dots\dots(7)$$

Kendala

$$; \text{ dan } \beta_s \text{ Bebas } \dots\dots(8)$$

Variabel  $\beta_s$  merupakan efisiensi teknis dan bernilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Programasi linier pada persamaan (7) dan (8) diasumsikan *constant return to scale* (CRS). Efisiensi teknis ( $\beta_s$ ) diukur sebagai rasio KF/KS dan bernilai kurang dari satu. Sementara  $(1-\beta_s)$  menerangkan jumlah *input* yang harus dikurangi untuk menghasilkan *output* yang sama sebagai bentuk efisiensi UKE seperti yang ditunjukkan oleh titik F. Kedua perhitungan, minimisasi *input* atau maksimisasi *output*, primal atau dual akan memberikan hasil sama.

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

DEA digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi/UKE (*Decision Making Unit/DMU*) suatu organisasi. Unit kegiatan ekonomi yang diaplikasikan dengan DEA di dalam makalah ini mencakup 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, termasuk kota yang termuda yaitu Kota Batu. Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan DEA (Insukindro dkk, 2000:8), pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Kedua, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

Dari hasil perhitungan DEA dengan asumsi CRTS seperti yang tertera pada Tabel 4.1., terlihat bahwa kabupaten/Kota yang sudah mengalami capaian efisien penuh (sebesar 100%) dari sisi *input* total dan *output* total ada 21 Kabupaten/Kota. Diantaranya adalah Bondowoso, Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Magetan, Sidoarjo, Tranggalek, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Situbondo, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Madiun, Ngawi dan Sumenep.

Kabupaten/Kota yang belum memenuhi efisiensi dari sisi *input* total dan *output* totalnya ada 17 Kabupaten/Kota. Masing-masing adalah Jember (dengan capaian efisiensi *input* sebesar 58,09; dan capaian efisiensi *output* sebesar 63,08), Pacitan (58,20; 54,89), Pamekasan (60,43; 62,87), Probolinggo (62,97; 59,77), Blitar (64,58; 68,52), Ponorogo (65,87; 62,77), Kota Batu (69,19; 59,08), Kota Pasuruan (74,53; 62,96), Lumajang (75,42; 61,19), Sampang (79,60; 62,76), Tulung Agung (80,15; 68,34), Bangkalan (83,44; 70,11), Mojokerto (86,47; 61,83), Banyuwangi (87,75; 70,27), Pasuruan (90,37; 62,44), Kota Blitar (91,88; 63,96), dan Malang (99,61; 70,38). Berikut ini analisis capaian efisiensi dari sisi *input* dan *output* ke-17 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang belum memenuhi efisiensi penuh (100%).

Sumber inefisiensi yang terbesar dari sisi *input* masing-masing adalah pengeluaran tidak terduga (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Lumajang, Tulung Agung, Bangkalan, Mojokerto, Kota Blitar, dan Malang), belanja perjalanan dinas (Sampang, Banyuwangi), belanja pemeliharaan (Kota Pasuruan dan Pasuruan), dan belanja pegawai (Blitar).

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Jember

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Jember dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 73,5%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 26,5%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja perjalanan dinas sebesar 21,8%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 78,2%. Dari target yang sebesar Rp 1.123.914.200 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 5.147.353.000 atau 400% (4 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja perjalanan dinas ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 79%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 21%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah pajak sebesar 36,2%. Artinya dari target pajak sebesar Rp 31.147.492.500, yang terealisasi baru Rp 11.288.810.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp 20 milyar.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Pacitan

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Pacitan dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai



TABEL 1. Capaian Efisiensi Input, Output dan Komponennya dengan Asumsi CRTS (Constant Return to Scale)

[illegible]

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Pamekasan dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 75,3%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 24,7%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 9,8%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 91,8%. Dari target yang sebesar

Rp 195.463.200 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 2.000.000 atau 1000% (10 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 80,2%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 19,8%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah sebesar 31 %. Artinya dari target Hasil Perusahaan Milik Daerah sebesar Rp 484.599.100, yang terealisasi baru Rp 150.461.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp 330 juta.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Probolinggo

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Probolinggo dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 77,3%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 22,7%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 12,7%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 77,3%. Dari target yang sebesar Rp 305.415.800 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 2.404.859.000 atau 787% (7,87 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 81,5%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 18,5%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah (HPMD) sebesar 6,4%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 574.437.400, yang terealisasi baru Rp 37.000.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp 537 juta.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Blitar

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Blitar dicapai oleh pos belanja pemeliharaan, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 78,5%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 11,5%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja pegawai sebesar 28,2%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 61,8%. Dari target yang sebesar Rp 55.816.057.200 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 197.667.479.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja pegawai ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* ke empat pos adalah sama sebesar 82,3%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 11,7%..

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Ponorogo

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Ponorogo dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 79,4%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 20,6%. Capaian efisiensi *input*

terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 6,1%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 93,9%. Dari target yang sebesar Rp 244.813.600 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 4.000.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 82,9%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 11,1%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 13,1%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 1.058.935.400, yang terealisasi baru Rp 138.746.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kota Batu

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Kota Batu dicapai oleh pos belanja pegawai dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 81,8%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 18,2%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 5,3%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 94,7%. Dari target yang sebesar Rp 129.182.700 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 2.430.470.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos pajak sebesar 84,6%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 15,4%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 7,6%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 355.556.200, yang terealisasi baru Rp 107.532.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kota Pasuruan

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Kota Pasuruan dicapai oleh pos belanja pegawai, belanja modal dan pengeluaran tidak terduga yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 85,4%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 14,6%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja pemeliharaan sebesar 22%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 78%. Dari target yang sebesar Rp 1.255.972.000 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 5.709.754.000 dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja pemeliharaan ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 87,3%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 12,7%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 30,2%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 355.556.200, yang terealisasi baru Rp 107.532.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Lumajang

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Lumajang dicapai oleh pos belanja pemeliharaan dan belanja modal yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 86%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 14%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 2,7%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 97,3%. Dari target yang sebesar Rp 151.912.000 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 6.191.564.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi sebesar 87,7%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 12,3%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah pajak sebesar 27,2%. Artinya dari target pajak sebesar Rp 24.029.042.000, yang terealisasi baru Rp 6.537.411.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Sampang

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Sampang dicapai oleh pos belanja pegawai, dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 88,6%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 11,4%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja perjalanan dinas sebesar 38,9%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 61,1%. Dari target yang sebesar Rp 207.648.300 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 533.856.000 dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja perjalanan dinas ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi sebesar 89,8%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 11,2%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 10,7%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 46.820.100, yang terealisasi baru Rp 5.000.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Tulungagung

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Tulungagung dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 89%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 11%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 36,4%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 63,6%. Dari target yang sebesar Rp 303.513.000 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 833.087.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi sebesar 90,1%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 9,9%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah

pajak sebesar 37,9%. Artinya dari target pajak sebesar Rp 21.308.373.000, yang terealisasi baru Rp 8.084.566.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Bangkalan

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Bangkalan dicapai oleh pos belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja modal yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 91%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 8%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 12,6%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 87,4%. Dari target yang sebesar Rp 820.850.000 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 6.531.886.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 91,7%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 8,3%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 12,1%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 2.450.432.800, yang terealisasi baru Rp 296.234.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Mojokerto

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Mojokerto dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 92,7%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 7,3%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 0,3%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 99,7%. Dari target yang sebesar Rp 179.774.900 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 60.286.601.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 93,2%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 6,8%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 48,8%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 1.423.357.000, yang terealisasi baru Rp 694.563.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Banyuwangi

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Banyuwangi dicapai oleh pos belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 93,5%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 6,5%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja perjalanan dinas sebesar 20,7%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 79,3%. Dari target yang sebesar Rp 923.689.800 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 4.463.200, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja perjalanan dinas ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 93,9%, sehingga capaian *output* ini masih

bisa ditingkatkan lagi sebesar 6,1%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 36,9%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 2.981.712.000, yang terealisasi baru Rp 1.990.060.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Pasuruan

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Pasuruan dicapai oleh pos belanja modal yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 94,9%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 5,1%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja barang dan jasa sebesar 35,3%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 64,7%. Dari target yang sebesar Rp 16.475.076.000 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 46.699.657.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja perjalanan dinas ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos pajak dan lain-lain PAD sebesar 95,2%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 4,8%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 0,5%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 1.383.400.000, yang terealisasi baru Rp 6.600.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kota Blitar

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Kota Blitar dicapai oleh pos belanja pegawai, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 95,8%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 4,2%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 5,5%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 94,5%. Dari target yang sebesar Rp 392.516.900 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp 7.114.320.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain PAD sebesar 95,9%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 4,1%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 6,1%. Artinya dari target HPMD sebesar Rp 1.005.519.400, yang terealisasi baru Rp 61.820.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

#### Sumber Inefisiensi di Kabupaten Malang

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Malang dicapai oleh pos belanja pemeliharaan, belanja modal dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 99,8%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 0,2%. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tidak terduga sebesar 15,4%, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 84,6%. Dari target yang sebesar Rp 301.757.100 rupiah, ternyata realisasinya sebesar

Rp 1.962.744.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tidak terduga ini. Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos pajak sebesar 99,8%, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 0,2%. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah retribusi sebesar 41,8%. Artinya dari target retribusi sebesar Rp 25.065.357.000, yang terealisasi baru Rp 10.489.198.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi.

Sumber inefisiensi terbesar dari sisi *output* masing-masing adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah/HPMD (Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Kota Batu, Kota Pasuruan, Sampang, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Kota Blitar) dan pajak (Jember, Pacitan, Lumajang, Tulungagung).

Capaian efisiensi terbesar dari sisi *input* masing-masing adalah belanja barang dan jasa (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Tulungagung, Mojokerto), belanja modal (Jember, Pamekasan, Blitar, Ponorogo, Kota Pasuruan, Lumajang, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Kota Blitar, Malang). Capaian efisiensi terbesar dari sisi *output* masing-masing adalah retribusi (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Blitar, Ponorogo, Kota Pasuruan, Lumajang, Sampang, Pasuruan, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Kota Blitar) dan lain-lain PAD (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Blitar, Ponorogo, Kota Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan dan Kota Blitar).

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Sumber inefisiensi yang terbesar dari sisi input masing-masing adalah pengeluaran tidak terduga (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Lumajang, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto, Kota Blitar, dan Malang), belanja perjalanan dinas (Sampang, Banyuwangi), belanja pemeliharaan (Kota Pasuruan dan Pasuruan), dan belanja pegawai (Blitar).

Sumber inefisiensi terbesar dari sisi output masing-masing adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah/HPMD (Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Kota Batu, Kota Pasuruan, Sampang, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Kota Blitar) dan pajak (Jember, Pacitan, Lumajang, Tulungagung).

Capaian efisiensi terbesar dari sisi input masing-masing adalah belanja barang dan jasa (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Tulungagung, Mojokerto), belanja modal (Jember, Pamekasan, Blitar, Ponorogo, Kota Pasuruan, Lumajang, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Kota Blitar, Malang).

Capaian efisiensi terbesar dari sisi output masing-masing adalah retribusi (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Blitar, Ponorogo, Kota Pasuruan, Lumajang, Sampang, Pasuruan, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Kota Blitar) dan lain-lain

PAD (Jember, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Blitar, Ponorogo, Kota Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan dan Kota Blitar).

#### Saran

Sumber inefisiensi yang terbesar dari sisi *input* masing-masing adalah pos pengeluaran tidak terduga dan belanja perjalanan dinas ini perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, karena biaya yang dikeluarkan untuk kedua pos ini sering tidak tepat sasaran sehingga terjadi pemborosan yang cukup besar. Sebagai contoh pengeluaran tidak terduga (sering disebut “dana taktis”) yang sifatnya fleksibel dan akuntabilitasnya cukup longgar, sering digunakan oleh aparat di tingkat daerah dalam mengeluarkan biaya-biaya yang tidak direncanakan sebelumnya. Pos yang kedua adalah belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang sering dilakukan oleh aparat terkadang tidak berkorelasi dengan manfaat yang seharusnya diperoleh. Atau dengan kata lain, perjalanan dinas yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan *output* penerimaan daerah, sebaiknya dikurangi.

Sumber inefisiensi terbesar dari sisi *output* masing-masing adalah pos Hasil Perusahaan Milik Daerah/HPMD dan pajak ini, sering dijadikan “lahan basah” bagi aparat sehingga antara target dan realisasi tidak sama. Terlalu banyak kepentingan yang bermain memungkinkan perusahaan daerah tidak pernah menghasilkan barang ataupun jasa secara lebih efisien. Sebagai contoh, Perusahaan daerah yang pasti ada di setiap Kabupaten/Kota yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sering terjadi konflik kepentingan bahkan bukan hanya di antara eksekutif, bahkan dengan pihak legislatif, sehingga masyarakat yang dirugikan. Biarkan perusahaan daerah diserahkan kepada para profesional yang mengelolanya sehingga mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat tapi juga pemerintah daerah. Capaian efisiensi dari komponen *input* yang sudah bagus ini hendaknya selalu diperbaiki kinerja mengingat “pengawasan yang melekat” (waskat) memungkinkan rendahnya terjadinya penyelewengan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Pusat Statistik, 2005, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2004.
- Bahl, Roy, And Linn, Johannes, 1992, *Urban Public Financer In Developing Countries*, New York: Oxford University Press.
- Bambang Brodjonegoro 2000, *Otonomi Daerah Dan Kondisi Fiskal Indonesia*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Bambang Tata Samiaji, 2003, *Local Economic Development* (Teori Dan Penerapannya), Urban And Regional Institute



- Banker, R.D., Charnes, A., And. Cooper, W.W., 1984, *Some Models For Estimating Technical And Scale Efficiencies In Data Envelopment Analysis*, Management Science 30 (9), 1079-1092.
- Bennett, Robert J, 1990, *Decentralisation, Local Governments And Markets*, Oxford: Clarendon University Press.
- Bird, R. M, Ebel, Robert, And Wallich, Christine, 1995, *Decentralization Of Socialist State: Intergovernmental Finance In Transition Economies*, Washington, DC: World Bank.
- Bird, R. M And F. Vaillancourt, 1998, *Fiscal Decentralization In Developing Countries, An Overview*, In Richard M. Bird And Francois Vaillancourt(Eds), Cambridge University Press, Cambridge, U.K.
- Boediono, 1992, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta.
- Boediono, 2002, *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Asas Desentralisasi Fiskal*, Makalah Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, Jakarta.
- Brennan, Geoffrey Dan Buchanan, James (1980), *Tax Limits And The Logic Of Constitutional Restriction*”, dalam “Democratic Choice And Taxation : A Theoretical And Empirical Analysis”, Hettich,W. And Winer,S.L.,Cambridge University Press,Hal.20-22.
- Charnes,A.,W.Cooper, Dan E. Rhodes, (1978), “Measuring The Efficiency Of Decission Making Units,” *Europian Journal Of Operational Research*, 3(4), 429-444.
- Davey, Kenneth, 1989, *Keuangan Pemerintah Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Farell, M.J, 1957, “The Measurement Of Productive Efficiency”, *Journal Of The Royal Statistical Society* 120 (Series A), 253-281Halim, Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Giufriada, A.,And Gravelle,H., 2001, “Measuring Performance In Primary Care: Econometric Analysis And DEA” *Department Of Economics And Related Studies University Of York*, Heslington, York.
- Insukindro, Nopirin, Makhfatih,A., Ciptono,S.M., 2000. “Laporan Akhir Pengukuran Efisiensi Relatif Pelayanan Kantor Cabang Pegadaian”, *Penelitian dan Pengembangan Manajemen (PPM) Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta
- Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah Di Indonesia, LPEM Universitas Indonsia Bekerjasama Dengan Clean Urban Project, RTI, Jakarta, 1999

- Lestari, Etty Puji, 2004, *Modul Pelatihan Metodologi Empiris Data Envelopment Analysis*, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
- Lewis, E, C. Newton, and Suntornsarattoon, M., 1999, A Verification of Weight Coefficient in the Objective Function for Efficiency Optimization of Dynamic System using DEA”, *Australian Conference on Information System*, 907-912
- LPEM Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Clean Urban Project, RTI (1999), “Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah Di Indonesia”, Jakarta.
- M.L Jhinghan, 1993, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Terjemahan Rajawali Press, Jakarta.
- Mahfud, Sidik. 2001, *Desentralisasi Fiskal*, Makalah Seminar Nasional FE UNAIR, Surabaya.
- Mahfud, Sidik. 2002, Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional, Departemen Keuangan
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Nomor 4 – Juli 2002.
- Mangkoesoebroto, G. 1999. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta. Indonesia.
- Miller.S.M., And Noulas.A.G., 1996, “The Technical Efficiency Of Large Bank Production”, *Journal Of Banking And Finance* 20, 495-509.
- Musgrave, Richard A, 1993, *Public Finance In Theory And Practice*, Fifth Edition, Mcgraw-Hill Book Company, USA.
- Nota Keuangan Dan RAPBN , Beberapa Edisi.
- OECD (1999): “Taxing Powers Of State And Local Government”, OECD Publication Service, France.
- Post, Thierry, And Spronk,J., 1999; “Including Economic Uncertainty In Data Envelopment Analysis; With An Application Of Large European Commercial Banks”, *Helsinki School Of Economics*, Finland. Internet.
- Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, 2000, “*Modul Data Envelopment Analysis (DEA)*”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah”.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah”.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.

- Ritonga, Anshari, 2004, “Kebijakan Efisiensi Belanja Negara” Dalam “Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep Dan Implementasi” Editor: Heri Subiyantoro, Ph.D. Dan Singgih Riphath, APU, Penerbit Buku Kompas.
- Shah, A., Et. Al, 1994 *Intergovernmental Fiscal Relations In Indonesia*, Issue And Reform Options, World Bank Discussion Paper, Washington DC.
- Sidik, Machfud, 2002, Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Disampaikan Dalam Acara Orasi Ilmiah Dengan Thema “*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - Di Bandung, 10 April 2002
- Simanjuntak, 2002, Fiscal Need Dan Fiscal Capacity Dalam Rangka Optimalisasi PAD, Departemen Keuangan
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ter-Minassian, Teresa, 1997, “Fiscal Federalism In Theory And Practice”, International Monetary Fund, Washington.
- Wibowo, Tri, 2004, “Potret Fiskal Daerah Sebelum Dan Pada Era Desentralisasi”, Hasil Makalah Dengan Judul Studi Efektivitas Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2004 Dengan Sumber Dana DIP Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan Tahun 2004.